



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- c. jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dilaksanakan sebagai berikut :


- a. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada masing-masing Bupati/Walikota dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;


- c. laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
- d. laporan pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Februari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 27 February 2017

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
I	PEMERIKSAAN															
A	Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Irbawil II & III)	1. Biro Keuangan Setda	Standar Akuntansi pemerintah	TA. 2016	PM	7	10	70	18,200,000			18,200,000	Januari Minggu IV	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu IV
B	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA dan Calk serta Penutupan BKU	49 SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT & Monev Pendampingan SKPD Provinsi	Mendorong dan Mendampingi SKPD dalam Percepatan Penyusunan Neraca, LRA dan CALK serta Penutupan BKU	TA. 2016	PM	5	100	500					Februari Minggu II	Februari Minggu III	1	Maret Minggu I
C	Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	1. Lingkup Provinsi NTT	Keuangan, Kepegawaian dan Aset	PM	Paket	5	3	15	64,000,000			64,000,000	PM	PM	PM	15 hari setelah Pemeriksaan
		2. Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Keuangan, Kepegawaian dan Aset	PM	Paket	7	3	21	59,840,000			59,840,000	PM	PM	PM	15 hari setelah Pemeriksaan
D	Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal															
	Inspektur Pembantu Wilayah II	1 Dinas Pertanian dan Perkebunan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000		6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	2 Dinas Kehutanan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000		6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	3 Dinas Peternakan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000		6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000		6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000		6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	6 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000		6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	7 Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000		6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Februari Minggu II

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP x P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luas Kota (Rp.)					
	Inspektur Pembantu Wilayah III	8 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	9 Dinas Pemuda dan Olah Raga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	10 Dinas Perhubungan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	11 Dinas Kesehatan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	12 Dinas Sosial	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	13 Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	15 Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	16 Badan Perpustakaan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	17 Badan Lingkungan Hidup Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	18 Dinas Pertambangan dan Energi	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	20 Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	21 Badan Arsip Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
	Inspektur Pembantu Wilayah III	22 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	23 Kantor Pengolahan Data Elektronik	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	24 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	25 Biro Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	26 Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	27 Biro Administrasi Pembangunan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	28 Biro Perekonomian	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	29 Biro Organisasi	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	30 Kantor Penghubung dan Promosi Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	7	5	35	43,690,000	-	30,040,000	73,730,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	31 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	32 Dinas Komunikasi & Informatika	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	34 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	35 Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Provinsi	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20	-	6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Objek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
	Inspektur Pembantu Wilayah I	36 Sekretariat Dewan Korpri	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	37 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	38 Biro Hukum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	39 Biro Hubungan Masyarakat	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	40 Badan Kesbangpol Linmas	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah I	41 Koperasi & UMKM	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah II	42 Dinas Pendapatan & Aset Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	43 Dinas Pertanian dan Perkebunan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah III	44 Biro Keuangan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	10	2	20		6,000,000	-	6,000,000	Januari Minggu II	Januari Minggu IV	1	Pebruari Minggu II
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	45 Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Prov NTT di Kab TTS	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016	PM	7	3	21	18,850,000	300,000	300,000	19,450,000	Juni Minggu II	Juni Minggu IV	1	Juli Minggu II
E	Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Kinerja UPT Dinas Provinsi di kabupaten/kota	1 Kota Kupang & Kabupaten Kupang	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	30,100,000	500,000	120,000	30,720,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		2 Kabupaten Timor Tengah Selatan	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	26,100,000	500,000	500,000	27,100,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		3 Kabupaten Timor Tengah Utara	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	26,350,000	500,000	1,000,000	27,850,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		4 Kabupaten Belu	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	26,350,000	1,400,000	5,160,000	32,910,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		5 Kabupaten Alor	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	26,350,000	1,400,000	6,800,000	34,550,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		6 Kabupaten Lembata	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	1,400,000	6,280,000	32,530,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		7 Kabupaten Flores Timur	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	1,400,000	8,030,000	34,280,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian	
									Uang Harian (Rp.) & Penghapusan	Dalam Kota (Rp.)						Luar Kota (Rp.)
		8 Kabupaten Sikka	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	27,600,000	1,400,000	9,800,000	38,800,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		9 Kabupaten Ende	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	27,600,000	1,400,000	7,420,000	36,420,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		10 Kabupaten Ngada	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	1,400,000	12,950,000	39,200,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		11 Kabupaten Nagekeo	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	2,400,000	12,950,000	40,200,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		12 Kabupaten Manggarai Timur	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	1,900,000	12,360,000	39,110,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		13 Kabupaten Manggarai	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	27,550,000	1,400,000	12,360,000	41,310,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		14 Kabupaten Manggarai Barat	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	28,600,000	1,400,000	13,270,000	43,270,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		15 Kabupaten Sumba Barat Daya	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	26,600,000	1,400,000	12,050,000	40,050,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		16 Kabupaten Sumba Barat	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	2,400,000	12,050,000	39,300,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		17 Kabupaten Sumba Tengah	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	2,400,000	12,050,000	39,300,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		18 Kabupaten Sumba Timur	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	26,350,000	1,400,000	12,500,000	40,250,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		19 Kabupaten Sabu Raijua	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	23,600,000	1,400,000	11,000,000	36,000,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		20 Kabupaten Rote Ndao	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	24,850,000	1,400,000	3,870,000	30,120,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
		21 Kabupaten Malaka	Fisik APBD Provinsi NTT	TA. 2016	PM	6	5	30	26,350,000	500,000	1,500,000	28,350,000	Pebruari Minggu IV	Maret Minggu I		Maret Minggu III
F	Pemeriksaan Kinerja /Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif Tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTT															
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Pemerintah Kota Kupang														
		1 Dinas Pendapatan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	4,050,000		-	4,050,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		2 Dinas Kesehatan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	4,050,000		-	4,050,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		3 Badan Lingkungan Hidup Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	4,050,000		-	4,050,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		4 Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	4,050,000		-	4,050,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP			
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Peme riksaan		PM	Hari peme riksaan (HP)	Peme riksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jum lah	Waktu Penyelesaian
											Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
Inspektur Pembantu Wilayah I	Pemerintah Kabupaten Kupang	1 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	16,087,500	-	392,000	16,479,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		2 BAPPEDA	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	16,087,500	-	392,000	16,479,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		3 BPMPD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	16,087,500	-	392,000	16,479,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		4 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	16,087,500	-	392,000	16,479,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
Inspektur Pembantu Wilayah III	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,887,500	-	525,000	14,412,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		2 BPM & Pelayanan Perijinan Terpadu 1 Pintu	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,887,500	-	525,000	14,412,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		3 Badan Lingkungan Hidup Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,887,500	-	525,000	14,412,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		4 RSUD Soe	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,887,500	-	525,000	14,412,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
Inspektur Pembantu Wilayah II	Kabupaten Timor Tengah Utara	1 Dinas Pendapatan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	700,000	14,687,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		2 BAPPEDA	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	700,000	14,687,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		3 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	700,000	14,687,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
		4 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	700,000	14,687,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	
Inspektur Pembantu Wilayah I	Pemerintah Kabupaten Belu	1 Badan Perbatasan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,296,000	16,283,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV	

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksa (P)	Jumlah (HP x P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		2 Dinas Kesehatan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,296,000	16,283,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV
		3 RSUD Belu	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,296,000	16,283,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV
		4 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,296,000	16,283,500	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Pemerintah Kabupaten Alor 1 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,870,000	16,857,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,870,000	16,857,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		3 Bappeda	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,870,000	16,857,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		4 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,987,500	-	2,870,000	16,857,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Pemerintah Kabupaten Lembata 1 Badan Kepegawaian Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	2,688,000	15,875,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	2,688,000	15,875,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	2,688,000	15,875,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		4 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	2,688,000	15,875,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Pemerintah Kabupaten Flores Timur 1 Bagian Umum Setda	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	17,487,500	-	3,300,500	20,788,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	17,487,500	-	3,300,500	20,788,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		3 Dinas PPKAD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	17,487,500	-	3,300,500	20,788,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		4 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	17,487,500	-	3,300,500	20,788,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
Inspektur Pembantu Wilayah IV	Pemerintah Kabupaten Sikka	1 RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,920,000	18,607,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		2 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan & Energi	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,920,000	18,607,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		3 Dinas Kesehatan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,920,000	18,607,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		4 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,920,000	18,607,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
Inspektur Pembantu Wilayah I	Pemerintah Kabupaten Ende	1 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,087,000	17,774,500	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		2 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,087,000	17,774,500	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		3 Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,087,000	17,774,500	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		4 Bappeda	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,687,500	-	3,087,000	17,774,500	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
Inspektur Pembantu Wilayah III	Pemerintah Kabupaten Ngada	1 Badan Lingkungan Hidup Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	5,022,500	18,210,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		2 Badan Penanaman Modal Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	5,022,500	18,210,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		3 Badan Kesbangpol Linmas	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	5,022,500	18,210,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		4 Bagian Hukum Setda	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	5,022,500	18,210,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP																															
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian																													
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)																																		
Inspektur Pembantu Wilayah II	Pemerintah Kabupaten Nagekeo 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,040,000	-	4,240,000	18,280,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV																														
																2 Dinas Kesehatan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,040,000	-	4,240,000	18,280,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV															
																															3 Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,040,000	-	4,240,000	18,280,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
Inspektur Pembantu Wilayah IV	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 1 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	4,816,000	18,003,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV																														
																2 Badan Kepegawaian Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	4,816,000	18,003,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV															
																															3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	4,816,000	18,003,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
Inspektur Pembantu Wilayah I	Pemerintah Kabupaten Manggarai 1 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,607,500	-	4,816,000	19,423,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV																														
																2 BPMPD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,607,500	-	4,816,000	19,423,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV															
																															3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,607,500	-	4,816,000	19,423,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
Inspektur Pembantu Wilayah II	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 1 Dinas Kehutanan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	15,087,500	-	5,134,500	20,222,000	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV																														

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Objek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		2 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	15,087,500	-	5,134,500	20,222,000	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
		3 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	15,087,500	-	5,134,500	20,222,000	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
		4 Dinas Kesehatan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	15,087,500	-	5,134,500	20,222,000	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya														
		1 BPPMD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,087,500	-	4,707,500	18,795,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		2 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,087,500	-	4,707,500	18,795,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		3 Dinas Kelautan dan Perikanan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,087,500	-	4,707,500	18,795,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		4 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	14,087,500	-	4,707,500	18,795,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat														
		1 Dinas Pendidikan & Olah Raga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	4,707,500	17,895,000	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		2 BAPPEDA	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	4,707,500	17,895,000	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		3 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	4,707,500	17,895,000	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		4 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	9	2	18	13,187,500	-	4,707,500	17,895,000	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah														
		1 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	5,057,500	18,245,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	5,057,500	18,245,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penghinaan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		3 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	5,057,500	18,245,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
		4 Badan Kepegawaian Daerah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	5,057,500	18,245,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 1 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	4,865,000	18,852,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		2 Dinas Kelautan dan Perikanan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	4,865,000	18,852,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		3 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	4,865,000	18,852,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
		4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	4,865,000	18,852,500	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 1 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	1,844,500	15,032,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		2 Bagian Keuangan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	1,844,500	15,032,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		3 Dinas Pekerjaan Umum	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	1,844,500	15,032,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		4 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,187,500	-	1,844,500	15,032,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Pemerintah Kabupaten Malaka 1 Dinas Kesehatan	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	875,000	14,862,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		2 Dinas Pertanian	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	875,000	14,862,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
		3 Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	875,000	14,862,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		4 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	13,987,500	-	875,000	14,862,500	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu IV
Inspektur Pembantu Wilayah IV		Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 1 Dinas PPKAD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	12,487,500	-	4,340,000	16,827,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
		2 Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	12,487,500	-	4,340,000	16,827,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
		3 Bagian Umum Setda	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	12,487,500	-	4,340,000	16,827,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
		4 Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	Administrasi Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	10	2	20	12,487,500	-	4,340,000	16,827,500	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
G	Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Kabupaten/Kota	1 Kota Kupang	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	5,600,000	-	-	5,600,000	September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu III
		2 Kabupaten Kupang	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21		-	-		September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu III
		3 Kabupaten TTS	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21		-	-		September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu III
		4 Kabupaten TTU	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21		-	-		September Minggu I	September Minggu II	1	September Minggu III
		5 Kabupaten Belu	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21		-	-		Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu III
		6 Kabupaten Alor	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21		-	-		Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu III
		7 Kabupaten Lembata	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21		-	-		Juni Minggu III	Juni Minggu IV	1	Juli Minggu I
		8 Kabupaten Flores Timur	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	17,950,000	840,000	4,818,000	23,608,000	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu III
		9 Kabupaten Sikka	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	20,050,000	840,000	5,880,000	26,770,000	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu III
		10 Kabupaten Ende	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21		-	-		Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu III

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan				Jadwal Pemeriksaan		LHP	
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		11 Kabupaten Ngada	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21					Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu III
		12 Kabupaten Nagekco	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21					Mei Minggu I	Mei Minggu II	1	Mei Minggu III
		13 Kabupaten Manggarai Timur	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21					Mei Minggu I	Mei Minggu II	1	Mei Minggu III
		14 Kabupaten Manggarai	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	20,170,000	840,000	7,416,000	28,426,000	Juli Minggu I	Juli Minggu II	1	Juli Minggu III
		15 Kabupaten Manggarai Barat	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21					Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu III
		16 Kabupaten Sumba Timur	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21					Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu III
		17 Kabupaten Sumba Barat	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	22,750,000	1,440,000	7,230,000	31,420,000	Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu III
		18 Kabupaten Sumba Barat Daya	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	19,450,000	840,000	7,230,000	27,520,000	Mei Minggu I	Mei Minggu II	1	Mei Minggu III
		19 Kabupaten Sumba Tengah	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	17,950,000	1,440,000	7,230,000	26,620,000	Mei Minggu I	Mei Minggu II	1	Mei Minggu III
		20 Kabupaten Rote Ndao	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21					Juni Minggu I	Juni Minggu II	1	Juni Minggu III
		21 Kabupaten Sabu Raijua	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21					Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
		22 Kabupaten Malaka	Administrasi Umum Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	TA. 2016 & TA. 2017	PM	7	3	21	19,150,000	300,000	900,000	20,350,000	Agustus Minggu I	Agustus Minggu II	1	Agustus Minggu IV
H	Pemeriksaan dalam rangka akhir masa jabatan	Pemerintah Kab. : 1 Bagian Tata Pemerintahan 2 Bagian Sekretariat DPRD 3 Bagian Keuangan 4 Bagian Umum/Perlengkapan 5 Dinas Pendapatan 6 Bagian Penyusunan Program 7 Bagian Kepegawaian/BKD 8 Bagian Hukum 9 Bappeda	a. Kebijakan Daerah, b. Sumber Daya Manusia, c. Barang Daerah, d. Keuangan Daerah	TA. 2010 & TA. 2016	PM									April Minggu III	1	Agustus Minggu IV
		Pemerintah Kab. : 1 Bagian Tata Pemerintahan 2 Bagian Sekretariat DPRD 3 Bagian Keuangan 4 Bagian Umum/Perlengkapan 5 Dinas Pendapatan	a. Kebijakan Daerah, b. Sumber Daya Manusia, c. Barang Daerah, d. Keuangan Daerah	TA. 2010 & TA. 2016	PM									Desember Minggu I	1	Desember Minggu III

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP x P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		6 Bagian Penyusunan Program 7 Bagian Kepegawaian/BKD 8 Bagian Hukum 9 Bappeda														
1	Pemeriksaan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah	1 Kota Kupang	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	4	40	13,000,000		-	13,000,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		2 Kabupaten Kupang	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	12	120	103,800,000	16,000,000	240,000	120,040,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		3 Kabupaten Timor Tengah Selatan	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	12	120	106,700,000	19,200,000	1,200,000	127,100,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		4 Kabupaten Timor Tengah Utara	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	12	120	98,950,000	17,600,000	2,200,000	118,750,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		5 Kabupaten Belu	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	6	60				-	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		6 Kabupaten Alor	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	8	80	107,600,000	22,560,000	16,320,000	146,480,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		7 Kabupaten Lembata	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	8	80				-	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		8 Kabupaten Flores Timur	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	10	100	117,700,000	26,320,000	22,484,000	166,504,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		9 Kabupaten Sikka	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	10	100	49,300,000	9,400,000	9,800,000	68,500,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		10 Kabupaten Ende	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	10	100	169,500,000	33,840,000	26,712,000	230,052,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		11 Kabupaten Ngada	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	8	80				-	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II
		12 Kabupaten Nagekeo	Penyaluran Dana, Pembangunan, Pembinaan, movev serta Pengendalian, pengawasan dan pembinaan	TA. 2016	PM	10	8	80	52,100,000	11,280,000	15,540,000	78,920,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	Desember Minggu II

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian	
									Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)						
J	Pemeriksaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah	1 Kota Kupang	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24	7,200,000			7,200,000	Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		2 Kabupaten Kupang	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		3 Kabupaten Timor Tengah Selatan	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		4 Kabupaten Timor Tengah Utara	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		5 Kabupaten Belu	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		6 Kabupaten Flores Timur	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		7 Kabupaten Ende	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		8 Kabupaten Nagekeo	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		9 Kabupaten Manggarai	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		10 Kabupaten Sumba Barat Daya	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		11 Kabupaten Sumba Timur	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		12 Kabupaten Alor	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		13 Kabupaten Lembata	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		14 Kabupaten Sikka	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		15 Kabupaten Manggarai Timur	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		16 Kabupaten Ngada	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		17 Kabupaten Manggarai Barat	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		18 Kabupaten Sumba Barat	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		19 Kabupaten Sumba Tengah	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		20 Kabupaten Rote Ndao	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		21 Kabupaten Sabu Raijua	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	Oktober Minggu III
		22 Kabupaten Malaka	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	TA. 2016	PM	6	4	24					Oktober Minggu I	Oktober Minggu II	1	
II	MONITORING DAN EVALUASI															
A	Evaluasi SAKIP	SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TA. 2016	PM											
B	Evaluasi Sakip	1 Pemerintah Kabupaten Flores Timur	Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TA. 2016	PM	2	6	12	10,450,000	560,000	3,212,000	14,222,000	November Minggu III	November Minggu IV	1	November Minggu IV

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Obyek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP x P)	Uang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		2 Pemerintah Kabupaten Siomba Timur	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	2	6	12	11,200,000	560,000	5,000,000	16,760,000	Oktober Minggu I	Oktober Minggu I	1	Oktober Minggu II
		3 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	2	6	12	12,700,000	560,000	5,308,000	18,568,000	Oktober Minggu I	Oktober Minggu I	1	Oktober Minggu II
		4 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	2	6	12	9,950,000	560,000	4,400,000	14,910,000	Oktober Minggu I	Oktober Minggu I	1	Oktober Minggu II
C	Monitoring Dan Evaluasi PMPRB	SKPD Provinsi NTT	Penilaian terhadap 8 Agenda Penilaian secara online dengan mengumpulkan data dan road map dari SKPD	TA. 2016	PM	20	4	80		20,800,000		20,800,000	Juli Minggu I	Juli Minggu I	1	Agustus Minggu II
D	Evaluasi RKA pada SKPD Prov. NTT	Biro Keuangan dan Bappeda Provinsi NTT	Evaluasi terhadap kelayakan Program Kegiatan SKPD lingkup Provinsi NTT	TA. 2016	PM	20	4	80		20,800,000		20,800,000	September Minggu III	September Minggu III	1	Oktober Minggu II
E	Evaluasi Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LAKHASN)	PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Evaluasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tingkat Provinsi NTT	TA. 2016	PM								Agustus Minggu III	Agustus Minggu III	1	September Minggu III
F	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	1 Pemerintah Kota Kupang	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					September Minggu I	September Minggu I	1	September Minggu II
		2 Pemerintah Kabupaten Kupang	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Oktober Minggu I	Oktober Minggu I	1	Oktober Minggu II
		3 Pemerintah Kabupaten TTS	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Oktober Minggu I	Oktober Minggu I	1	Oktober Minggu II
		4 Pemerintah Kabupaten TTU	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Oktober Minggu I	Oktober Minggu I	1	Oktober Minggu II
		5 Pemerintah Kabupaten Belu	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juni Minggu I	Juni Minggu I	1	Juni Minggu II
		6 Pemerintah Kabupaten Alor	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					September Minggu I	September Minggu I	1	September Minggu II
		7 Pemerintah Kabupaten Lembata	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					September Minggu I	September Minggu I	1	September Minggu II
		8 Pemerintah Kabupaten Flores Tinur	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					September Minggu I	September Minggu I	1	September Minggu II
		9 Pemerintah Kabupaten Sikka	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juli Minggu I	Juli Minggu I	1	Juli Minggu II
		10 Pemerintah Kabupaten Ende	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juni Minggu I	Juni Minggu I	1	Juni Minggu II
		11 Pemerintah Kabupaten Ngada	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juni Minggu I	Juni Minggu I	1	Juni Minggu II
		12 Pemerintah Kabupaten Nagekeo	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juni Minggu I	Juni Minggu I	1	Juni Minggu II
		13 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Agustus Minggu I	Agustus Minggu I	1	Agustus Minggu II
		14 Pemerintah Kabupaten Manggarai	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Agustus Minggu I	Agustus Minggu I	1	Agustus Minggu II

No	Jenis Kegiatan / Ruang Lingkup / Penanggungjawab	Objek Pemeriksaan	Sasaran dan Batasan Pemeriksaan		Anggaran Obyek pemeriksaan (Rp.)	Pemeriksaan			Anggaran Pemeriksaan			Jadwal Pemeriksaan		LHP		
			Sasaran Pemeriksaan	Batasan Pemeriksaan		Hari pemeriksaan (HP)	Pemeriksaan (P)	Jumlah (HP X P)	Usang Harian (Rp.) & Penginapan	Transport		Jumlah (Rp.)	Mulai	Akhir	Jumlah	Waktu Penyelesaian
										Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)					
		15 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Agustus Minggu I	Agustus Minggu I	1	Agustus Minggu II
		16 Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juli Minggu I	Juli Minggu I	1	Juli Minggu II
		17 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juni Minggu I	Juni Minggu I	1	Juni Minggu II
		18 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juni Minggu I	Juni Minggu I	1	Juni Minggu II
		19 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juli Minggu I	Juli Minggu I	1	Juli Minggu II
		20 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					September Minggu I	September Minggu I	1	September Minggu II
		21 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Agustus Minggu I	Agustus Minggu I	1	Agustus Minggu II
		22 Pemerintah Kabupaten Malaka	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Suplemen LPPD	TA. 2016	PM	6	2	12					Juni Minggu I	Juni Minggu I	1	Juni Minggu II

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

REKAPITULASI
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

No	Kegiatan	Jadual Pelaksanaan												Pelaksanaan							
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi		
I	PEMERIKSAAN																				
1	Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT		■												1	7	10	18,200,000	1	Kupang	
2	Pemeriksaan Kinerja pada SKPD Tingkat Provinsi	■													48	6	85	262,500,000	48	Kupang	
3	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	■													Paket	9	PM	165,500,000	PM	Kupang/ Kabupaten	
4	Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di kabupaten/kota														1	6	5	30,720,000	1	Kupang	
a	Kota Kupang & Kabupaten Kupang																				
b	Kabupaten Timor Tengah Selatan														1	6	5	27,100,000	1	Soe	
c	Kabupaten Timor Tengah Utara														1	6	5	27,850,000	1	Kefamemanu	
d	Kabupaten Belu														1	6	5	32,910,000	1	Atambua	
e	Kabupaten Alor														1	6	5	34,550,000	1	Kalabahi	
f	Kabupaten Lembata														1	6	5	32,530,000	1	Lewoleba	
g	Kabupaten Flores Timur														1	6	5	34,280,000	1	Larantuka	
h	Kabupaten Sikka														1	6	5	38,800,000	1	Sikka	
i	Kabupaten Ende														1	6	5	36,420,000	1	Ende	
j	Kabupaten Ngada														1	6	5	39,200,000	1	Bajawa	
k	Kabupaten Nagekeo														1	6	5	40,200,000	1	Mbay	
l	Kabupaten Manggarai Timur														1	6	5	39,110,000	1	Borong	
m	Kabupaten Manggarai														1	6	5	41,310,000	1	Ruteng	
n	Kabupaten Manggarai Barat														1	6	5	43,270,000	1	Labuan Bajo	
o	Kabupaten Sumba Barat Daya														1	6	5	40,050,000	1	Wetabula	
p	Kabupaten Sumba Barat														1	6	5	39,300,000	1	Waikabubak	
q	Kabupaten Sumba Tengah														1	6	5	39,300,000	1	Waibakul	
r	Kabupaten Sumba Timur														1	6	5	40,250,000	1	Waingapu	
s	Kabupaten Sabu Raijua														1	6	5	36,000,000	1	Seba	
t	Kabupaten Rote Ndao														1	6	5	30,120,000	1	Ba'a	
u	Kabupaten Malaka														1	6	5	28,350,000	1	Betun	
5	Pemeriksaan Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT																				
a	Kota Kupang								■						4	9	7	16,200,000	4	Kupang	
b	Kabupaten Kupang														4	9	7	65,918,000	4	Oelamasi	
c	Kabupaten Timor Tengah Selatan									■					4	9	7	57,650,000	4	Soe	
d	Kabupaten Timor Tengah Utara														4	9	7	58,750,000	4	Kefamemanu	
e	Kabupaten Belu														4	9	7	65,134,000	4	Atambua	
f	Kabupaten Alor														4	9	7	67,430,000	4	Kalabahi	

No	Kegiatan	Jadual Pelaksanaan												Pelaksanaan						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa/ Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi	
g	Kabupaten Lembata														4	9	7	63,502,000	4	Lewoleba
h	Kabupaten Flores Timur														4	9	7	65,952,000	4	Larantuka
i	Kabupaten Sikka														4	9	7	74,430,000	4	Sikka
j	Kabupaten Ende														4	9	7	71,098,000	4	Ende
k	Kabupaten Ngada														4	9	7	72,840,000	4	Bajawa
l	Kabupaten Nagekeo														4	9	7	74,240,000	4	Mbay
m	Kabupaten Manggarai Timur														4	9	7	72,714,000	4	Borong
n	Kabupaten Manggarai														4	9	7	77,694,000	4	Ruteng
o	Kabupaten Manggarai Barat														4	9	7	80,888,000	4	Labuan Bajo
p	Kabupaten Sumba Barat Daya														4	9	7	75,180,000	4	Wetabula
q	Kabupaten Sumba Barat														4	9	7	72,980,000	4	Waikabubak
r	Kabupaten Sumba Tengah														4	9	7	72,980,000	4	Waibakul
s	Kabupaten Sumba Timur														4	9	7	75,410,000	4	Waingapu
t	Kabupaten Sabu Raijua														4	9	7	67,310,000	4	Seba
u	Kabupaten Rote Ndao														4	9	7	60,128,000	4	Ba'a
v	Kabupaten Malaka														4	9	7	59,450,000	4	Betun
6	Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Kabupaten/Kota																			
a	Kota Kupang														1	7	3	5,600,000	1	Kupang
b	Kabupaten Kupang														1	7	3		1	Oelamasi
c	Kabupaten Timor Tengah Selatan														1	7	3		1	Soe
d	Kabupaten Timor Tengah Utara														1	7	3		1	Kefamemanu
e	Kabupaten Belu														1	7	3		1	Atambua
f	Kabupaten Alor														1	7	3		1	Kalabahi
g	Kabupaten Lembata														1	7	3		1	Lewoleba
h	Kabupaten Flores Timur														1	7	3	23,608,000	1	Larantuka
i	Kabupaten Sikka														1	7	3	26,770,000	1	Sikka
j	Kabupaten Ende														1	7	3		1	Ende
k	Kabupaten Ngada														1	7	3		1	Bajawa
l	Kabupaten Nagekeo														1	7	3	27,160,000	1	Mbay
m	Kabupaten Manggarai Timur														1	7	3		1	Borong
n	Kabupaten Manggarai														1	7	3	28,426,000	1	Ruteng
o	Kabupaten Manggarai Barat														1	7	3		1	Labuan Bajo
p	Kabupaten Sumba Barat Daya														1	7	3	27,520,000	1	Wetabula
q	Kabupaten Sumba Barat														1	7	3	31,420,000	1	Waikabubak
r	Kabupaten Sumba Tengah														1	7	3	26,620,000	1	Waibakul
s	Kabupaten Sumba Timur														1	7	3		1	Waingapu
t	Kabupaten Sabu Raijua														1	7	3		1	Seba
u	Kabupaten Rote Ndao														1	7	3		1	Ba'a
v	Kabupaten Malaka														1	7	3	20,350,000	1	Betun
7	Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Bupati																			
a	Pemeriksaan dalam rangka akhir masa jabatan Penjabat Bupati Lembata															PM	10	10		
b	Pemeriksaan dalam rangka akhir masa jabatan Bupati Flores Timur															PM	10	10		

No	Kegiatan	Jadual Pelaksanaan												Pelaksanaan					
		Januari	Februari	Marat	April	Mei	Junj	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa/ Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi
8	Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten/Kota																		
1	Kabupaten Malaka													1	6	4		1	Betun
2	Kabupaten Alor													1	6	4		1	Kalabahi
3	Kabupaten Lembata													1	6	4		1	Lewoleba
4	Kabupaten Sikka													1	6	4		1	Maumere
5	Kabupaten Sumba Tengah													1	6	4		1	Waibakul
6	Kabupaten Sumba Barat													1	6	4		1	Waikabubak
7	Kabupaten Ngada													1	6	4		1	Bajawa
8	Kabupaten Manggarai Timur													1	6	4		1	Borong
9	Kabupaten Manggarai Barat													1	6	4		1	Labuan bajo
10	Kabupaten Manggarai													1	6	4		1	Ruteng
11	Kota Kupang													1	6	4		1	Kupang
12	Kabupaten Kupang													1	6	4		1	Oelamasi
13	Kabupaten Timor Tengah Selatan													1	6	4		1	Soe
14	Kabupaten Timor Tengah Utara													1	6	4		1	Kefamenanu
15	Kabupaten Belu													1	6	4		1	Atambua
16	Kabupaten Flores Timur													1	6	4		1	Larantuka
17	Kabupaten Ende													1	6	4		1	Ende
18	Kabupaten Nagekeo													1	6	4		1	Mbay
19	Kabupaten Sumba Barat Daya													1	6	4		1	Wetabula
20	Kabupaten Sumba Timur													1	6	4		1	Waingapu
21	Kabupaten Rote Ndao													1	6	4		1	Baa
22	Kabupaten Sabu Raijua													1	6	4		1	Seba
9	Pemeriksaan Pelaksanaan Program Pembangunan Kelurahan/Desa Mandiri Anggur Merah																		
a	Kota Kupang													1	10	4	13,000,000	1	Kupang
b	Kabupaten Kupang													1	9	12	120,040,000	1	Oelamasi
c	Kabupaten Timor Tengah Selatan													1	9	14	127,100,000	1	Soe
d	Kabupaten Timor Tengah Utara													1	9	13	118,750,000	1	Kefamenanu
e	Kabupaten Belu													1	9	6		1	Atambua
f	Kabupaten Alor													1	9	8	146,480,000	1	Kalabahi
g	Kabupaten Lembata													1	9	8		1	Lewoleba
h	Kabupaten Flores Timur													1	9	14	166,504,000	1	Larantuka
i	Kabupaten Sikka													1	9	12	68,500,000	1	Sikka
j	Kabupaten Ende													1	9	14	230,052,000	1	Ende
k	Kabupaten Ngada													1	9	8		1	Bajawa
l	Kabupaten Nagekeo													1	9	8	78,920,000	1	Mbay
m	Kabupaten Manggarai Timur													1	9	12		1	Borong
n	Kabupaten Manggarai													1	9	12	151,457,000	1	Ruteng
o	Kabupaten Manggarai Barat													1	9	12	171,008,000	1	Labuan Bajo
p	Kabupaten Sumba Barat Daya													1	9	12	121,160,000	1	Wetabula
q	Kabupaten Sumba Barat													1	9	4	77,840,000	1	Waikabubak
r	Kabupaten Sumba Tengah													1	9	4	63,350,000	1	Waibakul
s	Kabupaten Sumba Timur													1	9	12		1	Waingapu

No	Kegiatan	Jadual Pelaksanaan												Pelaksanaan					
		Januari	Februari	Marat	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa/ Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi
t	Kabupaten Sabu Raijua													1	9	4	48,770,000	1	Seba
u	Kabupaten Rote Ndao													1	9	6	68,024,000	1	Ba'a
v	Kabupaten Malaka													1	9	12	35,000,000	1	Betun
10	Pemeriksaan Kinerja pada Kantor Penghubung NTT di Jakarta													1	7	5	84,130,000	1	Jakarta
11	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA, dan Calk, LPE dan LO serta Penutupan BKU lingkup Pemda Provinsi NTT																		Kupang
12	Pemeriksaan Kinerja pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Prov. NTT													1	7	3	19,450,000	1	Soe
II MONITORING DAN EVALUASI																			
1	Evaluasi LAKIP SKPD pemerintah Provinsi NTT																		Kupang
2	EVALUASI SAKIP																		
a	Kabupaten Flores Timur													PM	6	2	14,222,000	1	Larantuka
b	Kabupaten Sumba Timur													PM	6	2	16,760,000	1	Waingapu
c	Kabupaten Manggarai Barat													PM	6	2	18,568,000	1	Labuan Bajo
d	Kabupaten Sabu Raijua													PM	6	2	14,910,000	1	Seba
3	Monitoring dan Evaluasi pada 49 SKPD Provinsi Semester I & II													50	3	95	131,100,000	1	Provinsi
4	Evaluasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)													PM	15	4	15,800,000	1	Provinsi
5	Monitoring & Evaluasi PMPRB Pemerintah Provinsi NTT													PM	20	4	20,800,000	1	Provinsi
6	Evaluasi RKA pada SKPD Provinsi NTT													PM	5	13	20,100,000	1	Provinsi
7	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																		
a	Kota Kupang													PM	6	3		1	Kupang
b	Kabupaten Kupang													PM	6	3		1	Oelamasi
c	Kabupaten Timor Tengah Selatan													PM	6	3		1	Soe
d	Kabupaten Timor Tengah Utara													PM	6	3		1	Kefamemanu
e	Kabupaten Belu													PM	6	3		1	Atambua
f	Kabupaten Alor													PM	6	3		1	Kalabahi
g	Kabupaten Lembata													PM	6	3		1	Lewoleba
h	Kabupaten Flores Timur													PM	6	3		1	Larantuka
i	Kabupaten Sikka													PM	6	3		1	Sikka
j	Kabupaten Ende													PM	6	3		1	Ende
k	Kabupaten Ngada													PM	6	3		1	Bajawa
l	Kabupaten Nagekeo													PM	6	3		1	Mbay
m	Kabupaten Manggarai Timur													PM	6	3		1	Borong
n	Kabupaten Manggarai													PM	6	3		1	Ruteng
o	Kabupaten Manggarai Barat													PM	6	3		1	Labuan Bajo
p	Kabupaten Sumba Barat Daya													PM	6	3		1	Wetabula
q	Kabupaten Sumba Barat													PM	6	3		1	Waikabubak

No	Kegiatan	Jadual Pelaksanaan												Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan / Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa / Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan / Kegiatan	LHP / Laporan	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
r	Kabupaten Sumba Tengah																			s	Kabupaten Sumba Timur																			t	Kabupaten Sabu Raijua																			u	Kabupaten Rote Ndao																			v	Kabupaten Malaka																																							III	PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN																			1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																						
s	Kabupaten Sumba Timur																			t	Kabupaten Sabu Raijua																			u	Kabupaten Rote Ndao																			v	Kabupaten Malaka																																							III	PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN																			1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																										
t	Kabupaten Sabu Raijua																			u	Kabupaten Rote Ndao																			v	Kabupaten Malaka																																							III	PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN																			1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																														
u	Kabupaten Rote Ndao																			v	Kabupaten Malaka																																							III	PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN																			1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																		
v	Kabupaten Malaka																																							III	PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN																			1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																						
																				III	PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN																			1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																										
III	PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN																			1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																														
1	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester I di Kabupaten.....																			2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																		
2	Rapat Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Semester II di Nagekeo																			3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																						
3	Rapat Pra Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri																			4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																										
4	Rapat Regional Pemutahiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian di Jakarta																			IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																														
IV	KOORDINASI PENGAWASAN																			1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Jakarta																			2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	Konsultasi dalam Rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Kemendagri Rakor Penanganan Pengaduan Tromol Pos 5000																			VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VI	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARAT PENGAWASAN																				Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Diklat Sertifikasi JFA Auditor																				Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Diklat Sertifikasi JFA P2UPD																				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

M/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU KAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2017

TANGGAL : 2017

**JADWAL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/LPNK DAN INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	OBJEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2017												KETERANGAN		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES			
I. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI																A ITJEN KEM. DAGRI
1	Biro Administrasi Pembangunan		X													B ITJEN KEM. ESDM
2	Biro Hukum		X													C ITJEN KEM PERINDUSTRIAN
3	Biro Kesejahteraan Rakyat		X													
4	Biro Keuangan		XR													
5	Biro Organisasi		X													
6	Biro Pemerintahan		A2													D ITJEN KEM PERTANIAN
7	Biro Perekonomian		X													E ITJEN KEM. KEHUTANAN
8	Biro Umum		XR													KEHUTANAN
9	Biro Hubungan Masyarakat		X													F ITJEN D.K.P.
II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :																
1	Sekretariat DPRD		X													G ITJEN KEM. PERHUBUNGAN
III. KANTOR :																H ITJEN KEM. P.U
1	Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu		X													
2	Kantor Pengolahan Data Elektronik		X													I ITJEN KEM. KESEHATAN
3	Kantor Penghubung NTT															
4	Satuan Polisi Pamong Praja		X													J ITJEN KEM. DIKNAS
5	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX															
6	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah		X													
IV. DINAS-DINAS :																K ITJEN KEM. NAKERTRANS
7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		X													
8	Dinas Kehutanan	X														L ITJEN KEM. SOSIAL
9	Dinas Kelautan dan Perikanan		X													
10	Dinas Kesehatan	X	X													M ITJEN KEM. KOMINFO
11	Dinas Komunikasi dan Informatika		X													
12	Dinas Koperasi dan UMKM	X														N ITJEN KEM.
13	Dinas Pekerjaan Umum		X													PERDAGANGAN
14	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah			XR												O ITJEN MENTERI NEG.
15	Dinas Pendidikan & Kebudayaan		X													PEMUDA & OLAH RAGA

NO	OBJEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2017												KETERANGAN	
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES		
16	Dinas Perhubungan	X		G		G						G		P	ITJEN Meneg Kop.
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		X			N									
18	Dinas Pertambangan dan Energi		X	B										X	INSPEKTORAT
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	X					D					D			
20	Dinas Peternakan	X					D					D		Y	BPKP
21	Dinas Sosial	X						L							
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	X		K			K							Z	Itjen Kemen PP & PA
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	X				O									
V. BADAN DAERAH :														A2	Pemeriksaan Dana Dekon/TP & Adminduk)
24	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	X	Z	Z								Z			
25	Badan Kepegawaian Daerah		X												
26	Badan Arsip Daerah		X											A3	Pendampingan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan		X												
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		X								A			A3	
29	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		X				D					D		XR	Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Provinsi
30	Badan Lingkungan Hidup Daerah	X													
31	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		A2								A			A3	
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		X												
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		X								A			A3	Catatan :
34	Badan Perpustakaan Daerah	X													BPKP dapat melakukan pengawasan setelah ada kesepakatan dengan Itjen Kementerian/LPNK terkait
35	Inspektorat Provinsi										A			A3	
36	Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi		X												
37	Badan Pengelola Perbatasan		X												
38	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		X												
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		X												
VI. LEMBAGA TEKNIS DAERAH/PERSH. DAERAH/PUSAT :															
1	RSU Prof.W.Z. Yohanes	I	X					I	I			I			
2	UPT Pertanian Pusat						D						D		

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA